

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pengelolaan keuangan publik di Indonesia merupakan salah satu fondasi utama dari operasional pemerintahan yang efektif dan berdampak besar terhadap perkembangan ekonomi, sosial, dan politik negara ini. Pengelolaan dana publik yang berjumlah miliaran hingga triliunan rupiah memerlukan tata kelola yang cermat dan transparan. Oleh karena itu, serangkaian peraturan telah dikeluarkan, salah satunya adalah Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2020 tentang Manajemen Pemerintahan yang Efektif dan Efisien. Peraturan tersebut menjelaskan secara komprehensif tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap langkah pengelolaan keuangan publik.

Konsep transparansi dan akuntabilitas ini bukan hanya sebatas aturan, melainkan menjadi dasar dalam implementasi *Good Government Governance* (GGG). GGG merupakan paradigma pemerintahan yang menciptakan lingkungan dimana pemerintah beroperasi dengan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, integritas, serta kewajiban moral untuk bertanggung jawab kepada masyarakat. Prinsip GGG ini selaras dengan Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2020 tentang Pelayanan Publik, yang mewajibkan pemerintah untuk menyediakan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat.

Melalui implementasi GGG, diharapkan bahwa kualitas informasi akuntansi yang disajikan oleh pemerintah kepada publik dapat mengalami peningkatan yang substansial. Kualitas informasi akuntansi merupakan aspek kunci dalam memberikan gambaran yang akurat tentang keadaan keuangan pemerintah, serta penggunaan dana publik yang sah dan

efisien. Informasi akuntansi yang berkualitas adalah informasi yang relevan, dapat dipercaya, dan disampaikan tepat waktu. Prinsip ini selaras dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.03/2020, yang memberikan panduan lengkap mengenai penyusunan laporan keuangan entitas publik. Tetapi, untuk mencapai tingkat kualitas informasi akuntansi yang optimal, penting untuk tidak mengabaikan peran vital kompetensi akuntan. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2020 tentang Manajemen Staff Negeri Sipil menegaskan pentingnya kompetensi aparatur sipil negara, termasuk akuntan publik, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Akuntan yang kompeten memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menyusun laporan keuangan yang akurat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, kompetensi akuntan menjadi salah satu pilar yang mendukung kualitas informasi akuntansi yang baik.

Meskipun transparansi, akuntabilitas, implementasi GGG, dan kompetensi akuntan sangat penting, belum banyak penelitian yang secara komprehensif mengkaji pengaruh implementasi GGG dan kompetensi akuntan terhadap kualitas informasi akuntansi di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini memiliki tujuan utama untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, mendalam, dan terperinci tentang hubungan yang kompleks antara ketiga faktor ini.

Pengelolaan keuangan publik di Indonesia sangat penting dan diatur dalam berbagai peraturan, termasuk Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2020 tentang Manajemen Pemerintahan yang Efektif dan Efisien. Peraturan ini menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik, yang menjadi dasar dalam implementasi *Good Government Governance* (GGG). GGG adalah prinsip yang mendorong

pemerintah untuk bekerja secara efisien, efektif, dan bertanggung jawab, sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2020 tentang Pelayanan Publik.

Di sisi lain, kompetensi akuntan juga berperan penting dalam menciptakan kualitas informasi akuntansi. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2020 tentang Manajemen Staff Negeri Sipil. Pada tahun 2021, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan baru yang berdampak pada pengelolaan keuangan publik dan peran akuntan. Salah satunya yaitu Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan ini menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik, dan memperjelas peran akuntan dalam mencapai tujuan ini. Misalnya, akuntan diminta untuk memastikan bahwa laporan keuangan pemerintah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan disajikan dengan cara yang jujur dan transparan. Peraturan ini juga memperkuat pentingnya kompetensi akuntan dalam pengelolaan keuangan publik. Misalnya, akuntan diharapkan untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memahami dan menerapkan standar akuntansi pemerintahan.

Penelitian ini berhubungan dengan bagaimana implementasi GGG dan kompetensi akuntan mempengaruhi kualitas informasi akuntansi di kecamatan mangkubumi dapat memberikan wawasan yang berharga. Misalnya, penelitian ini dapat membantu memahami bagaimana peraturan dan standar, budaya organisasi, dan sumber daya mempengaruhi implementasi GGG dan kompetensi akuntan, dan bagaimana ini pada gilirannya mempengaruhi kualitas informasi akuntansi. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa kompetensi akuntan tidak hanya melibatkan pengetahuan dan keterampilan teknis

dalam akuntansi, tetapi juga pemahaman tentang peraturan dan standar yang berlaku, serta kemampuan untuk bekerja dalam lingkungan yang ditandai oleh transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, akuntan juga perlu memahami konteks di mana mereka bekerja. Misalnya, dalam pengelolaan keuangan publik, akuntan perlu memahami bagaimana pemerintah beroperasi, serta peraturan dan prosedur khusus yang berlaku untuk sektor publik. Ini mungkin berbeda dengan apa yang mereka pelajari dalam konteks bisnis atau perusahaan swasta. Akuntan juga perlu memiliki keterampilan komunikasi yang baik. Mereka harus mampu menjelaskan informasi akuntansi yang kompleks dengan cara yang mudah dipahami oleh orang lain, termasuk rekan kerja non-akuntan dan publik. Selain itu, akuntan perlu memiliki integritas dan etika kerja yang tinggi. Mereka harus berkomitmen untuk bekerja dengan jujur dan transparan, dan untuk melakukan pekerjaan mereka dengan sebaik-baiknya, meskipun mungkin ada tekanan untuk melakukan sebaliknya.

Fenomena yang terjadi, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK (<https://www.bpk.go.id>) atas 86 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) (termasuk Laporan Keuangan (LK) yang diperiksa Badan Pengawas Keuangan (BPK) dan dilaporkan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2021) dan 1 LK Bendahara Umum Negara (BUN) Tahun 2021 mengungkapkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 82 LKKL dan 1 LK BUN dan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 4 LKKL. Hasil pemeriksaan tersebut tidak termasuk LK BPK Tahun 2021 yang diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik dan memperoleh opini WTP. Secara keseluruhan, pada tahun 2021 K/L yang memperoleh opini WTP sebanyak 83 K/L dan 1 BUN (95%), serta opini WDP sebanyak 4 Kementerian/Lembaga (K/L) (5%), Capaian ini merupakan hasil usaha pemerintah dan kontribusi BPK dalam mendorong terwujudnya tata kelola dan tanggungjawab keuangan negara yang efektif, akuntabel, dan transparan sesuai dengan tujuan pembangunan

berkelanjutan *sustainable development goals* (SDGs), yaitu tujuan ke-16 terutama target 16.6 – mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan adanya kenaikan Opini LKKL Tahun 2021 dari opini WDP menjadi WTP pada 2 K/L yaitu Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Sedangkan, penurunan opini dari WTP menjadi WDP terjadi pada 4 K/L yaitu Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dan Kementerian Perdagangan. Empat LKKL memperoleh opini WDP karena terdapat permasalahan yang memengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan, di antaranya :

- (1) Dasar pencatatan piutang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) belum didukung dengan bukti yang memadai serta Kas Lainnya dan Setara Kas disajikan tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- (2) Saldo persediaan per 31 Desember 2021 tidak berdasarkan stock opname dan tidak dicatat dalam kartu persediaan tidak diketahui keberadaannya, dan tidak dapat dicatat sisa penggunaannya; serta
- (3) Saldo persediaan berupa barang diserahkan kepada pemerintah daerah/kelompok masyarakat tidak dilakukan penatausahaan, monitoring dan evaluasi secara memadai, serta tidak dilakukan inventarisasi fisik.

Untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah juga dapat dibantu dengan penerapan *Good Government* di instansi pemerintah. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Government Governance*) dapat dibuktikan dengan adanya kesesuaian pengelolaan anggaran oleh pemerintah daerah dengan laporan keuangan pemerintah daerah. Tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dapat meningkatkan kualitas informasi akuntansi, dengan diterapkannya beberapa prinsip *good*

governance yaitu transparansi dan akuntabilitas. Seperti yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani pada Webinar Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah tahun 2020 pada tanggal 22 September 2020 yaitu menghimbau kepada seluruh pemangku kepentingan termasuk Pemerintah Daerah untuk tetap menjaga kualitas transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Untuk memperoleh informasi akuntansi yang berkualitas, diperlukan kompetensi staf akuntansi. Kompetensi staf akuntansi merupakan salah satu factor terpenting dalam penyusunan laporan keuangan agar terciptanya laporan keuangan yang memiliki kualitas nilai informasi yang baik sehingga dapat digunakan oleh pengguna informasi laporan keuangan. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan bahwa kualitas laporan keuangan sangat terkait dengan kompetensi professional dari pembuat laporan keuangan, rendahnya kualitas laporan keuangan juga sangat terkait dengan tidak adanya aturan yang mewajibkan pembuat laporan keuangan mempunyai kompetensi dalam bidang akuntansi. Di Indonesia belum ada standar atau peraturan yang mengatur kompetensi minimum dari pihak manajemen Perusahaan yang bertanggungjawab atas akuntansi dan pelaporan keuangan (Nazrin:2017).

Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya tengah gencar menerapkan prinsip-prinsip *good goverment governance*. Salah satu fokus utama mereka adalah meningkatkan kompetensi staf-staf yang berhubungan dengan keuangan pemerintahan. Mereka telah menyelenggarakan pelatihan khusus mengenai standar akuntansi pemerintahan, serta program pengembangan kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing staf. Bahkan, mereka juga memberikan kesempatan bagi staf untuk mengikuti program sertifikasi profesional.

Selain itu, Kecamatan Mangkubumi juga berupaya meningkatkan kualitas informasi akuntansi. Mereka telah mengimplementasikan sistem informasi akuntansi terintegrasi, yang menghubungkan data keuangan dengan sistem informasi lainnya. Upaya transparansi juga dilakukan dengan mempublikasikan laporan keuangan secara berkala dan mudah diakses oleh masyarakat. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas, mereka juga telah memanfaatkan teknologi informasi untuk mengolah data akuntansi.

Camat Mangkubumi berperan aktif dalam mendorong implementasi *good governance* dengan memberikan pembinaan dan motivasi kepada staf-staf yang berhubungan dengan keuangan pemerintahan, mengkoordinasikan kegiatan keuangan dengan kegiatan pemerintahan lainnya, serta melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.

Fenomena ini menunjukkan bahwa sinergi antara penerapan *good government governance*, peran staf akuntansi, dan kualitas informasi akuntansi dapat menciptakan lingkungan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui upaya ini, Kecamatan Mangkubumi diharapkan dapat menjadi model bagi kecamatan lain dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkelanjutan.

Penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh Jajang Badruzaman (2014) menunjukkan bahwa penerapan *good government governance* berpengaruh positif terhadap kualitas informasi akuntansi, artinya kualitas informasi akuntansi tidak terlepas dari penerapan *good government governance* itu baik maka kualitas informasi akan semakin baik. Penelitian yang dilakukan oleh Fera Pratiwi Zai, Sahala Purba, dan Arison Nainggolan (2020) menyatakan bahwa penerapan *good government governance* berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh

Jajang Badruzaman (2014) menunjukan bahwa kompetensi staf akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas informasi akuntansi yang artinya kualitas informasi akuntansi tidak terlepas dari kualifikasi staf akuntansi jika kualifikasinya baik maka akan mendukung terhadap pembuatan pelaporan. Penelitian yang dilakukan oleh Ni Luh Nyoman Ari Udiyanti, Anantawikrama Tungga Atmadja, dan Nyoman Ari Surya Darmawan (2014), Dariana dan Jonase Oktavia (2018), dan Arizal Kamal Pasha (2018) juga menunjukan bahwa kompetensi staf akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Iwan Hermansyah dan Rina Marlina (2019) dan Putra Mhd Nazrin (2017) melakukan penelitian dengan hasil yang menunjukan bahwa Kompetensi Staf Akuntansi berpengaruh positif terhadap Kualitas Informasi Keuangan Daerah.

Berbeda dengan penelitian Zeyn (2011) menyatakan bahwa *good governance* tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Penelitian Ihsanti (2014) menyatakan sistem akuntansi keuangan tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Heda dan Aulia (2017) menyatakan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, disebabkan karena adanya kelemahan pada komponen lingkungan pengendalian yang kurang komitmen terhadap kompetensi dan belum optimal secara penegakan integritas dan nilai etika, serta kepemimpinan yang belum kondusif dan kurangnya hubungan yang baik dengan instansi lain serta kegiatan pengendalian yang lemah atas pengelolaan sistem informasi dan pengendalian fisik serta pembatasan akses dan akuntabilitas atas sumber daya dan pencatatan lemah, serta komponen pemantauan yang belum optimal. Penelitian Shetwi et al (2011) menyatakan peran audit internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang berarti kurangnya pengawasan untuk mengevaluasi kualitas laporan keuangan, sehingga menyebabkan laporan keuangan tidak relevan. Sama

halnya dengan penelitian Pinem (2015) menyatakan bahwa SDM tidak berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan karena kondisi kapasitas SDM yang belum mendukung dengan baik. Seperti sebagian besar staff penatausahaan bagian keuangan tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintahan diharuskan memiliki system pemerintahan yang baik. Banyak faktor yang mempengaruhi nilai kualitaas sitem informasi akuntansi , diantaranya GGG dan Kompetensi staff akuntansi sesuai dengan pernyataan peneliti terdahulu yang sudah disebutkan diatas. Perbedaan hasil penelitian terdahulu yang sudah dijelaskan diatas menjadi dasar peneliti tertarik melakukan suatu penelitian dengan judul **"Pengaruh Implementasi *Good Government Governance* dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Informasi Akuntansi"**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan beberapa pertanyaan yang merupakan gambaran ruang lingkup penelitian yang akan diteliti, sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi *Good Government Governance* berpengaruh terhadap Kompetensi Staf Akuntansi,
2. Bagaimana pengaruh Implementasi *Good Government Governance* dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Informasi Akuntansi secara parsial di pemerintahan kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya.
3. Bagaimana pengaruh Implementasi *Good Government Governance* dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Informasi Akuntansi secara simultan di pemerintahan kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya.

1.3 Tujuan Penelitian

Dari permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Implementasi *Good Government Governance*, Kompetensi Staf Akuntansi dan Kualitas Informasi Akuntansi pemerintahan kecamatan Mangkubumi, di Kota Tasikmalaya. Untuk mengetahui hubungan Implementasi *Government Good Governance* dengan Kompetensi Staf Akuntansi.
2. Untuk mengetahui pengaruh Implementasi *Good Government Governance* dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Informasi Akuntansi secara parsial
3. Untuk mengetahui pengaruh Implementasi *Good Government Governance* dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Informasi Akuntansi secara simultan di Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dengan fokus pada akuntansi sektor publik. Melalui hasil penelitian ini, diharapkan akan ada peningkatan pemahaman tentang penerapan *Good Government Governance*, pengembangan kompetensi staf akuntansi, dan peningkatan kualitas informasi akuntansi.

2. Terapan Ilmu Pengetahuan

- a. Bagi penulis, diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan mengembangkan pemahaman penulis tentang ilmu akuntansi di sektor publik, serta menambah wawasan dalam domain ilmu pengetahuan yang relevan.

- b. Bagi lembaga, terutama Fakultas Ekonomi, diharapkan menjadi sumber referensi tambahan dan bahan bacaan yang berharga dalam perpustakaan. Ini akan menjadi sumber yang dapat dimanfaatkan sebagai referensi, panduan, dan pembanding bagi penelitian lanjutan di masa mendatang.
- c. Bagi Pemerintah Daerah, diharapkan hasil penelitian ini dapat meningkatkan mutu informasi akuntansi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat dan terinformasi. Ini akan membantu dalam proses perencanaan, pengalokasian sumber daya, dan pembuatan kebijakan yang lebih efisien dalam ranah akuntansi sektor publik.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian direncanakan pada Pemerintah Daerah Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya.

1.5.2 Waktu Penelitian

Untuk memperoleh dan mengolah data/informasi yang berkenaan dengan masalah yang diteliti, penulis penelitian dengan pendekatan survey pada Perangkat Daerah kecamatan Mangkubumi, di Kota Tasikmalaya Jawa Barat dari Bulan September 2023 sampai dengan Januari 2024